

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan beberapa anggota masyarakat mengindikasikan bahwa bangsa ini tengah menghadapi permasalahan penurunan nilai (moral) yang cukup serius. Kasus korupsi, sering dilakukan para pejabat atau oknum-oknum pemerintah; tindakan kriminal juga sering terjadi di beberapa tempat, mulai dari pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan masih banyak bentuk tindakan penyimpangan lainnya, yang semuanya itu berkaitan dengan kondisi nilai moral masyarakat. Bahkan lembaga atau institusi yang mempunyai peran penting dalam pembinaan nilai-nilai bangsa, ternyata tidak bersih dari kegiatan yang menyimpang, termasuk di dalamnya adalah insitusi agama dan pendidikan. Institusi pendidikan¹ yang terkait dalam komponen tripusat pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat) seharusnya turut berperan dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini dikarenakan, dekadensi moral bangsa ini salah satunya dilatarbelakangi oleh gagalnya institusi pendidikan dalam melakukan proses pendidikan nilai kepada peserta didiknya.

Dekadensi nilai (moral) berawal dari sikap yang menjauhi etika religius (agama) (Arief, 2005:79). Menurut Danim (2004:59-60), ketika mencermati kondisi-kondisi tersebut (dekandensi moral), maka kita tidak terlepas dari dua hal pokok yang berkaitan dan harus diperhatikan: *pertama*, adanya gejala tereduksinya moralitas dan nurani sebagian dari SDM Indonesia. *Kedua*, arus

¹ Institusi pendidikan dalam hal ini meliputi institusi pendidikan informal, formal dan nonformal.

masuk generasi muda ke institusi pendidikan di setiap jenjang sebagai bagian dari diskursus pengembangan SDM Indonesia.

Hal kedua dari pernyataan tersebut mengisyaratkan perlunya peran institusi pendidikan dalam mengatasi kondisi merosotnya nilai-nilai yang dianut sebagian anggota masyarakat. Baik buruknya kualitas SDM kita, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh baik buruknya proses pendidikan kita. Institusi pendidikan mempunyai tugas untuk mengembangkan tiga aspek selama proses pendidikan, yaitu: aspek kognitif (pengetahuan), afeksi (penguasaan sikap) dan aspek psikomotorik (pengembangan keterampilan). Pembentukan moral generasi muda berada pada ketiga aspek tersebut.

Peranan institusi pendidikan tersebut juga semakin nyata ketika banyak terjadi tindakan penyimpangan (--untuk tidak menyebut tindakan kriminal) yang dilakukan remaja yang ternyata masih mengenyam bangku sekolah. Tawuran antarpelajar, penggunaan narkoba, hamil di luar nikah --yang dilanjutkan dengan aborsi, pemerkosaan, atau dalam skala yang kecil misalnya: perilaku membolos, menyontek sering kita lihat di hampir semua tempat. Terlepas dari motivasi atau hal yang mendasarinya, perilaku tersebut dilihat dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat (nilai etika maupun agama) sudah termasuk perilaku yang menyimpang.

Wacana mengenai pentingnya pendidikan nilai perlu mendapat perhatian, mengingat di era demokrasi, peran penguasa telah digantikan oleh keberadaan prinsip-prinsip nilai moral dalam perilaku dan interaksi (Lind, 2006:189). Banyak pihak yang berpandangan bahwa kondisi menurunnya kualitas moral bangsa ini, berawal dari apa yang sudah dihasilkan institusi pendidikan. Pendidikanlah yang sesungguhnya memberikan kontribusi yang paling besar terhadap munculnya situasi ini (Budiningsih, 2004:1-2). Dengan kata lain, situasi tersebut terjadi akibat kegagalan institusi pendidikan dalam membentuk moral remaja. School (dalam Danim, 2004:63) berpendapat bahwa praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moral yang

tinggi. Sebenarnya, banyak aliran filsafat yang dapat dijadikan acuan bagi upaya penegakan moralitas melalui proses pendidikan ini. Landasan filsafat apapun, perlu kita cari relevasinya dengan kondisi tantangan kehidupan nyata dalam masyarakat kita agar pendidikan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi penegakan nilai-nilai moralitas bangsa yang sedang menghadapi krisis multidimensi ini (Suyanto, 2006: 138). Institusi pendidikan, menurut Penulis memang memiliki “peran ganda”, di satu sisi pendidikan mengemban tugas untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam diri individu, namun di sisi yang lain, institusi pendidikan justru dapat memberikan kontribusi dalam menurunnya nilai-nilai yang dianut individu.

Secara formal, di Indonesia peran serta ini diwujudkan dalam pemberian mata pelajaran yang “sarat nilai”, seperti: Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila (yang sekarang telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Pemformalan ini mengakibatkan munculnya pandangan bahwa penanaman nilai dalam diri remaja hanya menjadi tanggung jawab guru kedua mata pelajaran tersebut. Akibatnya, ketika terjadi tindakan yang menyimpang dari norma atau nilai, maka yang dituding sebagai penyebabnya adalah si guru agama yang tidak berhasil mendidik siswanya. Guru mata pelajaran yang lain seolah lepas dari tanggung jawab itu. Padahal sebenarnya, pendidikan nilai menjadi tanggung jawab semua pendidik tanpa kecuali.

Secara formal, muatan pendidikan nilai di Indonesia sudah diberikan sejak siswa memasuki jenjang Taman Kanak-kanak. Sampai jenjang Perguruan Tinggi pun, muatan pendidikan nilai masih diberikan melalui komponen Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), terutama pada komponen mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama. Namun mengapa permasalahan moral bangsa belum atau bahkan tidak tertangani dengan baik sampai sekarang?

Hasil penelitian Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM Yogyakarta, sebagaimana dikutip Budiningsih (2004:7), menunjukkan bahwa

secara substansial, pendidikan agama telah gagal menanamkan perimbangan dalam membangun perilaku yang sepadan antara hubungan vertikal (manusia dengan Tuhan) dan horizontal (pemeluk agama satu dengan yang lain) dalam masyarakat yang damai dan pluralis. Dikatakan bahwa maraknya kekerasan kolektif dan munculnya terorisme merupakan indikasi nyata bahwa pembelajaran nilai-nilai agama itu tidak mampu menyentuh aspek perilaku (afektif dan psikomotorik) bagi jamaahnya. Pendidikan agama lebih didominasi oleh transfer ilmu pengetahuan agama dan lebih banyak bersifat hapalan yang tekstual, sehingga kurang menyentuh aspek sosial dalam hubungannya dengan ajaran hidup yang toleran dalam bermasyarakat dan berbangsa. Pendidikan agama yang selama ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal cenderung semakin eksklusif.

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan mendasar yang banyak dihadapi institusi pendidikan (formal) adalah berkaitan dengan masalah metode dalam proses pendidikan nilai di sekolah. Oleh karena itu, menurut Hamid, dkk (2001: 69), peranan pendidikan formal di sekolah, dapat berperan sebagai pelengkap (*complementary*) dalam proses pembentukan akhlak individu. Guru tidak boleh diberi tanggung jawab secara penuh karena sifatnya yang kurang otoritatif dan hubungan afektifnya terhadap atas individu. Justru, peran guru sebagai pelengkap adalah sesuai. Masyarakat dapat berperan sebagai pemantau atau pengontrol perkembangan pendidikan anak-anak. Masyarakat menjadi lingkungan sosial yang sentiasa memperhatikan anak-anak dalam perkembangan hariannya. Ini adalah "*social obligation*" setiap individu dalam masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam upayanya mewujudkan proses pendidikan nilai yang holistik muncul ketika pendidikan (baca: sekolah), terutama sekolah formal mulai dihinggapai virus "kapitalisasi pendidikan". Komponen pendidikan nilai nyaris terpinggirkan. Sekolah formal lebih terpaku pada pendidikan sains yang lebih "menjual" atau *marketable*,

sehingga komponen pendidikan nilai hanya digunakan sebagai pelengkap saja. Ironisnya, muatan pendidikan nilai ternyata juga tidak dimasukkan dalam salah satu mata ujian dalam Ujian Nasional (UN). Dengan kata lain, hal ini menurut Penulis dapat menimbulkan persepsi bahwa mata pelajaran pendidikan nilai tidaklah sepenting mata pelajaran sains yang diikutkan dalam Ujian Nasional.

Ekspansi sistem kapitalisme ke dalam dunia pendidikan telah menciptakan sebuah kondisi bertautnya logika pendidikan dengan logika kapitalisme (*logic of capitalism*). Pendidikan kemudian menjelma menjadi sebuah mesin kapitalisme (*capitalist machine*), yaitu mesin citra kapitalisme untuk mencari keuntungan. Pendidikan juga menjadi mesin citra kapitalisme, yaitu mesin yang menciptakan citra-citra (lembaga, individu, pengetahuan) yang sesuai dengan citra kapitalisme (Piliang, 2006: 355). Ketika isu kapitalisasi pendidikan mencuat dalam sistem pendidikan nasional kita, dampak yang paling dirasakan adalah biaya pendidikan yang semakin mahal, sehingga lembaga pendidikan kurang memiliki aksesibilitas yang tinggi. Akibatnya, tidak semua anak dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini banyak berdiri pusat-pusat kegiatan belajar yang didirikan oleh masyarakat lokal. Pusat kegiatan belajar ini (atau disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat -PKBM) dikategorikan sebagai jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Pendidikan Nonformal (PNF). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan PKBM adalah untuk memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. Berkaitan dengan komponen pendidikan nilai, maka penelitian ini mendeskripsikan mengenai proses pendidikan nilai di PKBM. Penulis tertarik untuk melihat proses pembelajaran nilai di PKBM dikarenakan jalur pendidikan

nonformal juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk aspek afektif dalam diri peserta didiknya. Selain itu, Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana lembaga Pendidikan Nonformal ini mewujudkan peran sertanya dalam proses pendidikan nilai dalam kegiatan belajarnya mengingat kajian mengenai proses pendidikan nilai di Pendidikan Nonformal belum banyak dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Kondisi kualitas perilaku generasi muda keberadaannya semakin menurun. Fenomena ini diindikasikan dengan berbagai bentuk perilaku negatif yang banyak dilakukan anak-anak ataupun remaja di usia sekolah. Peranan institusi pendidikan semakin dipertanyakan, terutama perannya dalam menanamkan nilai-nilai positif dalam diri peserta didik. Institusi pendidikan yang dimaksud adalah komponen tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Institusi sekolah merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam mendukung peranan keluarga dalam pendidikan.

Akan tetapi, peran sekolah ini semakin menurun di tengah ekspansi kapitalisasi pendidikan. Pendidikan nilai seolah-olah dinomorduakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan sekolah lebih mementingkan pendidikan sains. Hal ini dapat dilihat dalam susunan mata pelajaran dalam kurikulum formal, pendidikan nilai mendapat alokasi yang sedikit. Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) hanya diberi alokasi waktu dua jam pelajaran per minggu. Pernyataan ini lebih didasarkan pada porsi pendidikan nilai dalam kurikulum formal yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan muatan pendidikan yang lain (pendidikan sains).

Memang sangat diakui bahwa penanaman nilai-nilai bukanlah tanggung jawab guru Pendidikan Agama maupun Pendidikan Pancasila. Tanggung jawab tersebut berada di semua pihak pengajar dari semua mata pelajaran.

Banyak kelompok masyarakat dalam beberapa waktu terakhir ini mempunyai inisiatif mendirikan sekolah-sekolah nonformal yang bernaung di

bawah lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sekolah-sekolah ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak mengenyam bangku sekolah formal karena berbagai alasan.

Sekolah-sekolah yang didirikan melalui PKBM ini mempunyai karakter yang cukup berbeda dengan sekolah formal. Perbedaan tersebut nampak dalam karakter peserta didik yang beragam, proses pembelajaran yang bisa dikatakan lebih fleksibel dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal. Berkaitan dengan isu pendidikan nilai di sekolah, penelitian ini membahas mengenai proses pendidikan nilai yang dilakukan melalui PKBM. Adapun pertanyaan penelitian (*research question*) dalam penelitian adalah "*bagaimanakah proses pendidikan nilai yang dilakukan di PKBM Argowilis?*"

PKBM, di dalam Sistem Pendidikan Nasional dikelompokkan dalam jalur Pendidikan Non Formal (PNF), sehingga lulusan dari PKBM tetap diakui secara sah dan disetarakan dengan lulusan dari pendidikan formal. PKBM yang menjadi lokasi penelitian ini adalah PKBM Argowilis yang berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Tidak ada pertimbangan khusus dalam pemilihan lokasi ini, mengingat setiap PKBM memiliki karakter yang berbeda, sehingga keunikan yang ada pada masing-masing PKBM juga sangat beragam. PKBM Argowilis telah menyelenggarakan program Kegiatan Belajar Kejar Paket B dan Paket C.

1.3 Signifikansi Penelitian

Salah satu bidang kajian dalam sosiologi adalah sosiologi pendidikan. Dinamika proses pendidikan menjadi salah satu kajian yang dibahas dalam disiplin sosiologi pendidikan. Adanya dinamika ini, juga berimplikasi pada bagaimana peran serta institusi pendidikan dalam mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai krisis multidimensional yang dilatarbelakangi adanya krisis nilai (moral) yang dialami masyarakat dari hampir seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan hal

tersebut, melalui penelitian ini, cukup perlu untuk melihat peran serta institusi pendidikan dalam mengatasi permasalahan moralitas bangsa melalui proses pendidikan nilai.

Sisi praktis penelitian ini, akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan proses pendidikan. Proses transformasi nilai-nilai di sekolah, merupakan persoalan yang cukup rumit. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya peran yang terintegrasi dari seluruh aspek tripusat pendidikan, termasuk pemerintah. Penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dalam menemukan format pendidikan nilai yang dapat diterapkan di institusinya masing-masing. Peran serta sekolah yang “cukup kecil” ini diharapkan secara tidak langsung bisa turut mengatasi permasalahan bangsa yang sangat kompleks.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendidikan nilai yang dilakukan di PKBM “Argowilis”. Proses pembelajaran ini meliputi metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah serta proses pembelajaran melalui kurikulum formal dan kurikulum tersembunyi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat yang menyelenggarakan sekolah-sekolah nonformal (PKBM) dalam mengadakan suatu proses pendidikan yang tidak hanya bermuatan pendidikan sains, namun juga proses pendidikan yang bermuatan nilai-nilai humaniora.

1.5 Studi yang Pernah Dilakukan

Ada tiga hasil penelitian yang diuraikan dalam penelitian ini mengenai pendidikan nilai. Ketiga penelitian tersebut dilakukan oleh Mariaye, Budiningsih dan Blatt. Mariaye (2005), dalam disertasinya berjudul "*The Role of the School in Providing Moral Education in a Multicultural Society: The Case of Mauritius*", menuliskan bahwa sekolah mempunyai peran yang cukup krusial dalam pembentukan moralitas masyarakat. Pada kasus di masyarakat Mauritius, Afrika, menurutnya, pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah, mempunyai peran dalam upaya pembentukan moral masyarakat. Upaya ini bisa diwujudkan melalui sosialisasi ataupun dialog moral dalam lingkungan sekolah.

Asri Budiningsih, melakukan studi mengenai metode *Pembelajaran Moral di Sekolah yang Berpijak pada Karakteristik Ssiswa dan Budayanya*. Budiningsih, dalam penelitian ini mengambil kasus remaja di Jawa. Karakter yang dimaksudkan di sini meliputi karakter yang berhubungan dengan 1) aspek kognitif siswa mengenai moral; 2) kepercayaan eksistensial (jiwa, pengalaman iman); 3) perasaan moral (emosional, empati); dan 4) aspek tindakan.

Menurutnya, dari aspek kognitif mengenai moral, penalaran moral remaja di Jawa cenderung berorientasi pada kerukunan atau orientasi *good boy-nice girl*. Remaja cenderung berpandangan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau menolong orang lain serta diakui orang lain. Metode penanaman moral pada masa ini lebih banyak menggunakan cara-cara ins-truktif, ceramah, nasihat, hukuman edukatif dan kadang-kadang diskusi. Anak atau remaja dengan cara indoktrinasi dibawa menuju kepada kedewasaan seperti yang dikehendaki orang dewasa. Tujuan pembelajaran ini tidak sampai pada tahap penalaran atau penilaian, akibatnya, anak dapat melaksanakan nilai-nilai yang dikehendaki orang dewasa, tetapi tidak memahami alasannya. Mereka dapat menghapalkan, namun tidak mengerti maknanya. Pada karakteristik iman, masa remaja masih berada pada tahap di saat siswa masih menempatkan "kebenaran" berada di antara ia dan orang lain. Pada masa ini, siswa masih menempatkan

orang lain sebagai cermin bagi dirinya. Menurut Budiningsih, hal ini disebabkan karena pendidikan kepercayaan (iman) di sekolah selama ini hanya dilakukan melalui pendidikan agama dengan pendekatan teologis-dogmatis. Siswa hanya diposisikan sebagai pihak yang tinggal menerima dan meyakini. Budiningsih berpendapat bahwa sangat penting bagi guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan dengan kata-kata, aksi dan kontemplasi kepercayaan yang ada dalam diri mereka.

Empati remaja di Jawa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam menanggapi pernyataan lawan bicaranya mereka cenderung merefleksikan *surface-feelings*, yaitu hanya menanggapi perasaan-perasaan yang terungkap, sedangkan perasaan di balik pernyataan belum dapat ditangkap. Menanggapi temuan ini, menurut Budiningsih, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa melalui praktik, untuk mengambil sudut pandang orang lain dan untuk menempatkan dirinya ke dalam posisi orang lain. Upaya ini dilakukan melalui diskusi kelompok, *role-play* (bermain peran) dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

Remaja di Jawa mengatur interaksinya melalui prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Gotong royong merupakan perwujudan prinsip kerukunan, bertujuan untuk saling membantu dan melakukan pekerjaan bersama demi kepentingan bersama. Berpedoman pada prinsip tersebut, menurut Budiningsih, guru sebaiknya dapat menciptakan suasana tempat persoalan-persoalan antarpribadi diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan (moral) bukan berdasarkan kekuasaan. Guru perlu menanggapi dengan serius segala persoalan moral, merangsang proses pemikiran siswa dan bukan menuntut "jawaban-jawaban benar" yang konvensional.

Penelitian Budiningsih ini memberikan kontribusi mengenai beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk penanaman nilai-nilai moral dalam diri anak. Metode tersebut di antaranya adalah diskusi kelompok, *role-play*

(bermain peran) dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat, kegiatan gotong royong serta menghindari upaya indoktrinasi dalam proses pembelajaran.

Hasil penelitian Blatt, mengenai metode pendidikan moral di sekolah yang dikutip Budiningsih (2004:75) menunjukkan bahwa metode yang meng-andalkan pada induksi konflik kognitif mengenai masalah-masalah moral, dan keterbukaan terhadap tahap berpikir yang langsung ada atas tahap berpikir anak itu sendiri, dapat meningkatkan moral anak secara berarti dan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Peranan guru di sini lebih pada membantu siswa mempertimbangkan berbagai konflik moral, untuk melihat inkonsistensi dan ketidaksesuaian cara berpikir dalam mengatasi masalah-masalah moral. Penelitian Blatt ini memberikan satu metode dalam proses pendidikan moral, yaitu metode induksi konflik kognitif ini diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, salah satunya melalui metode diskusi kelas.

1.6 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1.6.1 Konsepsi mengenai Nilai

Nilai merupakan sebuah konsep yang abstrak. Secara singkat nilai dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. nilai sangat berkaitan dengan norma yang dianut masyarakat sebagai satu kesatuan. Nilai juga dapat menjadi norma dalam suatu masyarakat. Tidak sedikit individu yang melihat “nilai” sebagai satu keuntungan secara ekonomis belaka atau dengan kata lain, nilai sering disamakan dengan harga atau keuntungan. Dalam masyarakat yang bersifat konsumeristis, nilai-nilai yang dibagikan sering hanya dihubungkan dengan apa yang dilihat dalam iklan. Nilai orang atau pribadi sering dibatasi dengan kemampuan mereka untuk memiliki materi (Darminta, 2006:12).

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak juga dapat berwujud sebuah materi yang tak berwujud. Nilai-nilai ini bahkan selalu menjadi tujuan hidup setiap individu, misalnya adalah kepandaian, kehormatan, keindahan (estetika) dan

sebagainya. Pada tatanan hidup bermasyarakat, keberadaan nilai menjadi sangat penting. Sebagaimana dijelaskan di awal, nilai juga berposisi sebagai sebuah norma yang membatasi sebuah perilaku menjadi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Secara sosiologis, nilai dilihat sebagai norma yang membatasi perilaku individu, sebuah nilai dan norma yang membatasi baik buruknya sebuah perbuatan dilakukan. Apabila merujuk pada pemikiran Durkheim (Johnson, 1990:174) mengenai Fakta Sosial, maka moral merupakan satu bentuk Fakta Sosial, yang bersifat memaksa, obyektif serta universal.

Nilai-nilai yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah nilai-nilai sosial. Menurut Raven (dalam Zubaedi, 2006:12), *social values are a set of society attitude considered as a truth and it is become the standard for people to act in order to achieve democratic and harmonious life* (nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis). Nilai-nilai sosial perlu ditanamkan dalam diri individu karena nilai-nilai sosial berfungsi sebagai acuan bertingkah laku dalam berinteraksi dengan sesama sehingga keberadaannya dapat diterima di masyarakat. Nilai-nilai sosial memberikan pedoman bagi warga masyarakat untuk hidup berkasih sayang, hidup harmonis, hidup disiplin, hidup berdemokrasi dan hidup bertanggung jawab (Zubaedi, 2006:12-13).

Nilai-nilai sosial terdiri atas tiga subnilai (Zubaedi, 2006:13), pertama, *loves* (kasih sayang) yang terdiri atas pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, kesetiaan dan kepedulian. Kedua, *responsibility* (tanggung jawab) yang terdiri atas nilai rasa memiliki, disiplin dan empati. Ketiga, *life harmony* (keseerasian hidup) yang terdiri atas nilai keadilan, toleransi, kerja sama dan demokrasi. Ada dua tujuan pendidikan nilai ini. Pertama adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri peserta didik. Kedua adalah

merubah nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan (Zubaedi, 2006: 13).

Salah satu nilai sosial yang sering menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat adalah nilai moral. Nilai moral (akhlak)² secara harfiah diartikan sebagai adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab atau sopan santun dan agama. Secara universal dan hakiki, nilai moral merupakan aturan kaidah baik dan buruk, simpati atas fenomena kehidupan dan penghidupan orang lain dan keadilan dalam bertindak (Danim, 2003:65).

Aspek moral, dari beberapa definisi di atas nampak jelas tidak hanya menyangkut masalah perilaku, masalah batasan baik atau buruk, akan tetapi, moral meliputi juga komponen kognitif. Artinya, seseorang dapat dikatakan bermoral jika ia mempunyai kesadaran moral, yaitu dapat menilai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta hal-hal yang etis dan tidak etis (Budiningsih, 2004:5).

Pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepada peserta didiknya. Menurut Geulen (tanpa tahun):

"..education can be defined as exerting an intentional influence on the learning and development of others..". In general, we understand it to be the influence that professionals (e.g., teachers) exert on young people (especially children) in settings established specifically for this purpose (e.g., schools).

Guru dalam hal ini mengharapkan perilaku siswanya sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pendidikan nilai menurut Musgrove (dalam Devine, 2006:4), merupakan:

"...Must, therefore, take account of the way in which these choices seem to be made. Attention must be given to the knowledge needed, the

² Kata "moral" diidentikkan dengan istilah "akhlak". Menurut Suwito, arti kata "akhlak" bisa disamakan dengan kata etika, moral dan etiket. Namun sebenarnya terdapat pengertian yang berbeda ketika menyangkut perilaku lahir dan batin manusia. Hanya kata "akhlak" dan etika yang mempunyai maksud sama ketika menyangkut perilaku lahir dan batin manusia. Kata moral dan etiket cenderung dimaksudkan sebagai perilaku lahiriah manusia semata (Suwito, 2004:35).

relevant structures to be used, the skills necessary for interpreting the thoughts, feelings and actions of others involved, and to the process of weighting used by moral actors as they balance these elements..."

Pendidikan nilai di era globalisasi terutama ditujukan pertama, pada penanaman nilai-nilai untuk menangkis pengaruh nilai-nilai negatif yang cenderung mendorong nilai-nilai negatif dalam artian moral yang merupakan akibat arus globalisasi. Kedua, untuk memerangi kecenderungan materialisme, konsumerisme dan hedonisme (Djiwandono, 2002:101). Pendidikan nilai harus dimulai sejak awal kehidupan domestik individu. Proses ini akan terus berulang dalam tingkatan yang lebih tinggi, seperti: dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Devine, 2006:3). Apabila peran pendidikan sangat maksimal dalam penanaman nilai pada diri generasi muda, maka ketika siswa meninggalkan bangku sekolah, ia akan menjadi manusia yang berkualitas dan memiliki derajat nilai yang tinggi. Pendidikan sejati merupakan proses penegakan nilai moral masyarakat yang beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang normal. Dengan kata lain, pendidikan adalah moralisasi masyarakat, terutama peserta didik (Danim, 2003:63-64).

Menurut Suparno (dalam Budiningsih, 2004:5), untuk memiliki nilai moral yang baik dan benar, seseorang tidak cukup sekedar melakukan tindakan yang dapat dinilai baik dan benar. Seseorang dapat dikatakan sungguh-sungguh bermoral apabila tindakanya disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan yang tertanam dalam tindakan tersebut. Moralitas suatu kelompok atau masyarakat, mempunyai dinamika dan pergeseran karena adanya interpretasi dan pemahaman yang juga berkembang dari waktu ke waktu. Meski demikian, moralitas di manapun selalu digunakan sebagai acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku, karena moralitas mempunyai kriteria nilai (*values*) yang berimplikasi takaran kualitatif, seperti: baik-buruk, benar-salah, wajar-tidak, pantas-tidak dan sebagainya (Suyanto, 2006:134).

Pada dasarnya, pendidikan nilai dilakukan guna menumbuhkan kecerdasan moral dalam diri individu. Kecerdasan moral (*moral intelligence*) merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan antara hal yang baik dengan hal yang buruk (salah). Kecerdasan ini juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menyangkut kepentingan dirinya sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain di sekitarnya (Coles and Hass, 2001).

Kecerdasan moral tidak hanya dapat dicapai dengan mengingat kaidah dan aturan, hanya dengan diskusi abstrak di sekolah atau saat di dapur. Individu dapat tumbuh secara moral sebagai hasil mempelajari bagaimana bersikap terhadap orang lain; bagaimana berperilaku di dunia ini; pelajaran yang ditimbulkan oleh tindakan memasukkan ke dalam hati apa yang kita lihat dan kita dengar (Coles, 2003:5).

1.6.2 Konsepsi Pendidikan: Implikasinya terhadap Pendidikan Nilai

Pendidikan di dalam kehidupan sosial suatu bangsa memegang peranan yang sangat krusial. Maju dan berkembangnya sebuah peradaban bangsa, sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang dijalankannya. Pendidikan merupakan sistem yang cukup kompleks yang di dalamnya mengandung beberapa proses yang sangat rumit. Bahkan, lebih dari itu, dunia pendidikan selalu menjadi pusat perhatian serius yang dihadapi negara-negara di dunia.

Demikian halnya dengan pendidikan di Indonesia. Sejak berdirinya Bangsa Indonesia, pendidikan di Indonesia belum menemukan formasi yang sesuai dengan kondisi bangsa ini yang sangat heterogen; multietnis, multikultural, multiagama juga multibahasa. Bangsa Indonesia yang heterogen dan plural, menjadi masalah unik yang harus dihadapi oleh seluruh elemen pendidikan di negeri ini. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pendidikan nasional sudah mendapat tempat yang sangat istimewa, yang ditunjukkan dengan dimasukkannya peranan sektor pendidikan menjadi

salah satu tujuan Bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pendidikan merupakan satu aspek yang cukup simpel di dalam proses sosialisasi, pendidikan dapat menambah pengetahuan (*knowledge*) serta pembelajaran keterampilan. Apakah proses itu terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja, pendidikan seringkali juga membantu membentuk kepercayaan serta nilai-nilai moral (Haralambos, *et.al*, 2004:690). Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai kedewasaan dalam segala hal.

a. Paulo Freire: Pendidikan sebagai Proses Penyadaran

Freire seorang tokoh pendidikan liberal³ dari Brazil, merumuskan sebuah proses pendidikan sebagai *sebuah proses penyadaran kepada seorang individu*. Penyadaran merupakan inti dari pemikiran Freire mengenai pendidikan, dan Freire menegaskan bahwa *penyadaran adalah inti sebuah proses (pendidikan)* (Freire, 2002). Pemikiran Freire berawal dari pandangannya terhadap realitas sosial. Di dalam kehidupan sosial, Freire melihat adanya dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Dominasi ini selanjutnya berubah menjadi sebuah proses penindasan⁴ terhadap golongan lemah. Penindasan ini ternyata terus berlangsung, sampai akhirnya Freire melihat bahwa penindasan tersebut terus berlangsung ketika golongan lemah tidak mempunyai kesadaran atas hakikat keberadaan dan posisi dirinya dalam kehidupan sosial. Ia (golongan lemah) tidak menyadari bahwa pada hakikatnya ia adalah manusia, yang sama dengan golongan yang kuat yang menguasai dirinya dan ia tidak mempunyai kesadaran atas realitas sosial di sekitarnya

³ Pendidikan liberal di sini dimaksudkan bahwa pemikiran Freire tentang pendidikan digolongkan dalam ideologi pendidikan yang liberal menurut tipologi ideologi pendidikan William F. O'Neil.

⁴ Istilah "penindasan" merupakan indikasi bahwa pemikiran Freire dipengaruhi pemikiran Marx, yang melihat adanya dominasi kelas tertentu (penguasa modal) atas kelas yang lain (kelas proletar, buruh).

(Freire, 2002). Dengan kata lain, ketika kesadaran itu tidak ada, maka ia pun secara tidak langsung tidak menyadari bahwa dirinya tengah mengalami sebuah penindasan. Menurut Freire, pendidikan merupakan sarana yang efektif guna menumbuhkan “kesadaran” tersebut.

Freire menjelaskan perlunya belajar melalui *pengalaman* sebagai praktik pendidikan yang membebaskan (Freire, 2002; Freire dalam Naomi [ed.], 2003:434-459). Siswa dan guru dalam proses pembelajaran adalah berposisi sebagai subyek. Di sisi lain, kenyataan atau realitas sosiallah yang menjadi obyek. Untuk dapat memahami realitas sosial sebagai obyek belajar, maka pengalaman menjadi unsur penting dalam proses ini. Hubungan guru dan siswa harus berjalan melalui proses dialog karena melalui dialog inilah keduanya bisa mengakomodasi pengalaman mereka. Dialog sangat diperlukan agar guru dan siswa merasa mempunyai posisi yang sederajat, sehingga tidak ada lagi dominasi guru atas diri siswa. Inilah yang disebut Freire sebagai proses pendidikan yang membebaskan, karena tidak ada lagi “subyek” yang menjadi “obyek”. Siswa bukanlah obyek belajar, melainkan subyek belajar. Ketika guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran, maka secara tidak langsung, tanpa kita sadari siswapun masih berada pada posisi yang terbelenggu.

Implikasi pemikiran Freire dalam pendidikan nilai, menurut Penulis adalah ketika pendidikan nilai digunakan sebagai sarana penyadaran, maka yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran pada peserta didik mengenai hakikat nilai sosial (dan segala wujudnya) yang universal. Berkaitan dengan proses pendidikan nilai, yang meliputi tahap kognitif sampai psikomotorik, proses kognitif merupakan suatu tahap yang sangat krusial. Pada tahap inilah siswa mulai melakukan upaya penyadaran. Keberhasilan pada tahap ini, harus diwujudkan dalam bentuk perilaku (aspek psikomotorik)

siswa dalam kehidupan sosialnya. Ketika individu tidak menyadari perlunya nilai-nilai sosial dalam kehidupan sosial, maka iapun tidak dapat melakukan tindakan yang berdasarkan pada kesadaran sosial (universal).

Dialog menjadi unsur penting terjadinya proses pendidikan yang humanis menurut Freire. Ketika terjadi dialog, maka tidak terjadi lagi dominasi guru atas diri siswa. Dialog ini, menurut Penulis bisa menjadi sebuah sarana pendidikan moral di sekolah. Melalui dialog, ketika seorang anak dikatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seharusnya anak juga berhak untuk mengetahui “mengapa ia dihukum”; “mengapa ia dikatakan bersalah”, selain itu, anak juga berhak untuk melakukan “justifikasi” atas tindakannya. Hanya dengan dialoglah, kesadaran dalam diri siswa dapat dimunculkan. Siswa dapat mengetahui, mengapa tindakannya salah, sehingga guru memberikan hukuman kepadanya? Siswa berhak membela diri ketika tindakannya menurut dia benar namun dinilai salah oleh guru.

Dialog dalam proses pendidikan merupakan satu wujud adanya peranan *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) dalam proses pendidikan. Giddens (2006:1016) menyebut istilah *hidden curriculum* sebagai “*traits of behaviour our attitudes that are learned at school, but which are not included within the formal curriculum. The hidden curriculum is the ‘unstated agenda’ involved in schooling -conveying.*”

b. Emile Durkheim: Sekolah sebagai Media Pendidikan Nilai

Durkheim tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa itu “pendidikan” dan “pendidikan nilai”. Nilai yang dibahas dalam pemikiran Durkheim adalah nilai moral. Pemikiran Durkheim mengenai pendidikan moral didasari atas proses pendidikan yang terjadi di Perancis, yang tengah mengalami revolusi pendidikan. Pendidikan pada masa itu lebih banyak bernuansa pendidikan sekuler. Dalam 20 tahun

terakhir, anak-anak di sana diberikan pendidikan moral sekuler, dalam arti adalah pendidikan moral yang didasarkan pada rasionalias (nalar) dan bukan didasari wahyu agama tertentu. Pendidikan moral sekuler secara eksklusif bersandar pada gagasan, sentimen dan praktik-praktik berdasarkan perhitungan nalar (rasio). Durkheim meyakini bahwa kepercayaan rasional dan orientasi tindakan personal tidak dapat dipisahkan (*separable*) dan anak-anak seharusnya diajar secara sukarela melalui hukum-hukum masyarakat yang ditempatkan pada hati individu mengenai beberapa nilai⁵. Bagi Durkheim, moral pada dasarnya berkaitan dengan isi, tindakan aturan-aturan atau tingkah laku tertentu. Durkheim menjelaskan:

*"morality is not system of abstract truth which can be derived from some fundamental notion, posited as self evident... it belongs to the realm of life, not to speculation. It is a set of rules of conduct, of practical imperatives which have grown up historically under the influence of specific social necessities"*⁶.

Norma merupakan salah satu konsep inti dalam pemikiran Durkheim. Norma menciptakan keteraturan sosial, sekaligus berfungsi sebagai sistem yang membatasi perilaku dan tingkah laku individu.

Titik tolak pemikian Durkehim mengenai pendidikan moral yang dilakukan di sekolah-sekolah negeri, menjadikan ia berargumen bahwa peran sekolah dalam pendidikan dan perkembangan moral adalah sangat besar, bahkan lebih besar dari peranan keluarga. Jika peran sekolah tidak maksimal, maka unsur-unsur kebudayaan yang sangat penting akan hilang. Meskipun keluarga merupakan tempat yang paling tepat dan efektif untuk membangkitkan dan mengatur perasaan-perasaan mendasar yang sederhana, akan tetapi keluarga bukanlah lembaga yang didirikan

⁵ Filloux, *op.cit*: 6

⁶ Durkheim, dalam Haricahyono, 1995:327

dengan tujuan mendidik anak untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.

Durkheim dalam bukunya "*Moral Education*", menjelaskan mengenai beberapa unsur moralitas serta peranan sekolah dalam pendidikan moral. Unsur moralitas menurut Durkheim meliputi: disiplin, keterikatan pada atau identifikasi dengan kelompok dan adanya otonomi.

Unsur disiplin terdiri atas komponen konsistensi atau keteraturan tingkah laku dan wewenang (Durkheim, 1961:31-32). Konsistensi akan mengindikasikan bahwa apa yang menjadi moral hari ini atau sekarang, akan menjadi moral untuk esok hari. Komponen wewenang mengindikasikan adanya sistem yang memaksa individu untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. unsur disiplin menetapkan beberapa cara untuk memberikan respons yang pantas, tanpa disiplin, tatanan dan kehidupan yang terorganisasi tidak akan terwujud. Selain itu, menurut Durkheim, disiplin akan memberikan jawaban kepada kebutuhan individu akan pengekangan, yang memungkinkan individu mencapai tujuan tertentu secara berturut-turut. Dengan kata lain, unsur disiplin dalam moral, merupakan unsur yang berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian individu (anak), yang diwujudkan dalam sikap. Unsur disiplin terdiri atas komponen konsistensi atau keteraturan tingkah laku dan wewenang. Konsistensi akan mengindikasikan bahwa apa yang menjadi moral hari ini atau sekarang, akan menjadi moral untuk esok hari. Komponen wewenang mengindikasikan adanya sistem yang memaksa individu untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. unsur disiplin menetapkan beberapa cara untuk memberikan respons yang pantas, tanpa disiplin, tatanan dan kehidupan yang terorganisasi tidak akan terwujud. Selain itu, menurut Durkheim, disiplin akan memberikan jawaban kepada kebutuhan individu akan pengekangan, yang

memungkinkan individu mencapai tujuan tertentu secara berturut-turut.

Durkheim menyatakan:

Moral discipline is not only useful for formal life as such; its action extends beyond that. It plays a significant role in the shaping of character and of the personality in general. Indeed, what is most essential in character is the aptitude to exercise self-control, the faculty of restraint, or, as they say inhibition that enables us to contain our passions and desires and to call them to order. Discipline is useful, therefore, not only in the interest of society and as an indispensable means without which there would be no regular cooperation, but in the interest of individual himself. Especially in democratic societies like ours children must be taught this healthy moderation. This is because the conventional barriers which forcibly curbed desires and ambitions in societies organized differently have partly fallen away and so only moral discipline is left to exercise this regulatory function⁷.

Dengan kata lain, unsur disiplin dalam pendidikan moral, merupakan unsur yang berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian individu (anak), yang diwujudkan dalam sikap. Sikap tersebut nantinya bisa menjadi proses latihan dalam mengontrol dirinya sendiri. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan.

Unsur moralitas kedua adalah keterikatan pada atau indentifikasi dengan kelompok. Moralitas menurut Durkheim (1961:57-58) merupakan suatu orientasi impersonal. Tindakan yang ditujukan demi kepentingan pribadi tidak pernah dianggap bersifat moral. Obyek yang menjadi sasaran moral harus sesuatu yang berada di luar diri seseorang atau di luar sejumlah orang dari sejumlah individu yang lain. Obyek moral, dengan kata lain, adalah kelompok atau masyarakat, sehingga *bertindak secara moral berarti bertindak demi kepentingan kolektif*.

Unsur ketiga adalah otonomi. Perilaku yang mengingkari atau membatasi otonomi dikatakan amoral. Menurut Durkheim (1961:120)

⁷ Durkheim, dalam Filloux, *op.cit*: 6-7

untuk bertindak secara moral, tidak cukup hanya dengan menghormati disiplin dan terikat pada kelompok. Namun, lebih dari itu, kita harus mempunyai pengetahuan serta kesadaran mengenai alasan perbuatan kita. Kesadaran ini memberikan otonomi kepada tingkah laku kita yang selanjutnya akan dibutuhkan oleh kesadaran umum dari setiap makhluk moral yang sejati dan lengkap.

Sekolah, menurut Durkheim (1961:xiv-xv) mempunyai fungsi yang sangat penting dan khusus untuk menciptakan makhluk baru yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pembatasan, individu akan terbebaskan dari frustrasi, serta apabila anak dididik secara sistematis mengenai warisan kebudayaan negerinya, maka individu tersebut dapat memiliki rasa identitas dan kepuasan pribadinya. Ketika individu sadar akan keterlibatannya dalam suatu masyarakat melalui ikatan-ikatan kewajiban dan keinginan, maka ia akan menjadi seorang yang bermoral. Individu yang berlebihan dalam pendidikan dapat mengakibatkan kegagalan pribadi dan kekacauan sosial.

Sekolah merupakan tempat yang paling sesuai untuk pendidikan moral karena, menurut Durkheim, suatu moralitas yang logis harus dibentuk berdasarkan nalar, bukan wahyu (melalui institusi agama). Keluarga juga bukan merupakan tempat yang sesuai untuk pendidikan moral, karena keakraban dan kehangatan ikatan kekerabatan bertentangan dengan tuntunan moralitas yang keras. Di sisi yang lain, pendidikan moral tidak dapat ditunda sampai dewasa, juga tidak dapat dipercayakan kepada orang atau anggota keluarga yang sudah dewasa karena mereka akan terlalu banyak menuntut kepada anak kecil.

c. John Dewey: Pengalaman sebagai Sumber Pendidikan

Pendidikan, menurut Dewey, seorang filsuf terkemuka, merupakan sebuah sarana yang cukup efektif bagi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam salah satu bukunya "*Democracy and*

Education", ia menjelaskan definisi proses pendidikan (Dewey, 1944:76; Dewey, 1978):

We thus reach a technical definition of education: it is that reconstruction or reorganization of experience which adds to the meaning of experience, and which increase ability to direct the course of subsequent experience.

Konsep *pengalaman* menjadi kunci pemikiran Dewey mengenai pendidikan. Pengalaman menjadi sangat penting dalam memahami realitas di sekitar kita. Belajar melalui pengalaman, merupakan konsep pendidikan yang sama seperti konsep pendidikan yang ditawarkan Freire. Pengalaman merupakan komponen pokok dalam proses pembelajaran. Pendidikan moral termasuk di dalamnya, perlu mengaitkan aspek pengalaman yang diwujudkan melalui perilaku individu dalam praktik kehidupan sosialnya.

1.6.3 Konsep Sekolah Nonformal

Kedudukan sekolah nonformal di samping sekolah formal, tidak terlepas dari pemikiran Ivan Illich mengenai "sekolah bebas". Pemikiran Illich bermula dari pemikirannya mengenai keberadaan sekolah formal yang (dianggap) menjadi satu-satunya jalan menuju keberhasilan individu. Hal yang salah menurut Illich selama ini adalah ketika masyarakat menyamakan "sekolah" dengan "pendidikan". Illich menolak keras anggapan tersebut. Baginya, anggapan itu mengakibatkan sekolah (formal) diposisikan menjadi semacam "dewa penyelamat" bagi seseorang untuk dapat masuk "surga dunia", karena Illich menganalogikan sekolah sebagai bentuk "agama baru di masyarakat modern" (Illich, 2000:3-14; 59-61).

Sekolah, menurut Illich (2000:3), hanyalah salah satu jalan atau sarana dalam mencapai pendidikan. Bersekolah di sekolah (formal), dengan demikian, bukanlah menjadi sebuah keharusan bagi individu. Illich, sebagaimana Freire dan Dewey, juga menegaskan perlunya "pengalaman" yang dapat digunakan sebagai sarana mencapai pendidikan. Untuk bisa

meraih pendidikan, individu tidak perlu setiap hari datang ke sekolah, mengikuti pelajaran secara formal, di akhir waktu sekolahnya, individu memperoleh ijazah, sehingga mendapat ijazah menjadi sebuah keharusan – inilah yang dinamakan Illich sebagai kurikulum tersembunyi di sekolah formal.

Sebagai “lawan” dari sekolah formal, Illich memberikan alternatif sebuah konsep “sekolah bebas”. Jika pada sekolah formal, tempat belajar dibatasi oleh ruang kelas dan berbagai bentuk “kurikulum tersembunyi” lainnya, maka di sekolah bebas, masyarakatlah yang menjadi ruang kelasnya. Guru-guru di sekolah bebas, diberi kebebasan untuk mengajar di luar sekolah dan membawa siswanya menuju “kehidupan nyata di sekitarnya”. Sekolah bebas, menurut Illich (2000:99-101), mempunyai dua syarat, yaitu pertama, sekolah harus dijalankan sedemikian rupa agar mencegah masuknya kurikulum tersembunyi (sebagaimana di sekolah formal). Kedua, harus tersedia kerangka kerja tempat seluruh peserta (guru dan siswa) dapat membebaskan diri dari landasan-landasan tersembunyi masyarakat tersekolahkan.

Sekolah nonformal (PKBM) di dalam Sistem Pendidikan Nasional berkedudukan sebagai salah satu komponen pendidikan nonformal. Istilah “masyarakat” menjadi cukup populer mengingat keberadaan sekolah ini menjadi memang di selenggarakan oleh masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat tanpa mengenal batas usia. PKBM ini banyak didirikan ketika banyak masyarakat usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah formal yang dikenal sangat mahal atau karena faktor geografis yang jauh dari sekolah formal. Sekolah ini banyak didirikan oleh sebuah komunitas sosial yang *concern* pada masalah pendidikan masyarakat.

Sekolah nonformal, dalam praktiknya banyak memanfaatkan sumber daya pendukung di sekitar sekolah yang mudah didapatkan. Untuk menambah bekal pengetahuan di bidang pertanian, para siswanya langsung

bisa memanfaatkan sawah di kanan kiri sekolah itu, bahkan kadang kala para siswanya langsung bisa berpraktik di sana. Ini merupakan satu kelebihan sekolah nonformal dibandingkan dengan sekolah formal biasa (sekolah konvensional).

Sekolah nonformal yang diselenggarakan masyarakat, bisa dinamakan juga sekolah masyarakat (*community schools*), mengingat sekolah ini diselenggarakan oleh kelompok masyarakat setempat yang ditujukan juga untuk anggota masyarakat di sekitarnya.

Sekolah nonformal yang diadakan melalui PKBM ini, diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Untuk itu, segala proses dan isi pendidikannya selalu berpedoman pada kebutuhan dan karakteristik masyarakat tempat sekolah itu berada. Oleh karena itu, sekolah inipun diharapkan bisa menjadi salah satu komponen Sistem Pendidikan Nasional yang mampu mengatasi berbagai problematika bangsa ini.

Secara formal, konsep sekolah nonformal dikenal dengan istilah Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Adanya istilah "masyarakat" ini menunjukkan bahwa jalur pendidikan ini terbuka untuk semua anggota masyarakat dengan tidak terikat aturan usia. Secara struktural, PKBM hadir sebagai sebuah alternatif jalur pendidikan yang dikenal berbiaya lebih murah bahkan gratis. Banyak lembaga pendidikan nonformal terbukti mampu menghasilkan lulusan yang sama kualitasnya bahkan lebih handal dari pada lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan formal dalam menghadapi persaingan, dengan tawaran sifat aplikatif dan biaya yang relatif lebih murah.

Keunggulan lain yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan nonformal sebenarnya ada pada fleksibilitas waktu yang dimiliki. Selain bisa dijalankan secara manunggal, pendidikan non formal bisa dijalankan pula secara berdampingan dengan pendidikan formal. Tak mengherankan apabila belakangan lembaga pendidikan non formal tumbuh dengan pesat,

berbanding lurus dengan tingginya minat masyarakat terhadap jenis pendidikan tersebut (Korporatorium Pendidikan Nonformal dalam Kompas, 15 Januari 2008).

1.6.4 Proses Pendidikan Nilai di Sekolah

Sebagaimana dijelaskan di atas, proses pendidikan nilai merupakan sebuah proses yang melibatkan tiga unsur pendidikan secara holistik, yaitu unsur kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk mencapai ketiga unsur tersebut, pendidikan nilai harus dilakukan secara terpadu, baik melalui kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi⁸. Sebagaimana Freire, Dewey dan juga Illich, yang berpendapat bahwa pengalaman menjadi unsur penting dalam proses pendidikan, maka seharusnya untuk memperoleh pengalaman tersebut, siswa harus dihadapkan pada kenyataan-kenyataan kehidupan yang real yang ada di sekitarnya. Pengalaman merupakan interaksi dengan dunia nyata dalam kehidupan ketika masih belajar berbagai pelajaran dalam kurikulum pendidikan (Suyanto, 2006:141). Proses pendidikan di kelas, juga menjadi komponen pendidikan yang penting, ketika di kelas siswa banyak berinteraksi dengan teman sebayanya. Interaksi siswa dengan teman sebayanya merupakan sebuah pengalaman yang diperoleh siswa secara langsung.

Praxis pendidikan nilai, pada saat sekarang menghadapi berbagai tantangan. Guru di sekolah dihadapkan pada kenyataan bahwa nilai-nilai yang berkembang dan dikenal siswa mulai beragam. Siswa tentu saja memperoleh serta mengadopsi nilai-nilai tersebut dari berbagai sumber, yang tentu saja beberapa sumber tersebut berada di luar kontrol guru, keluarga maupun masyarakat. Media massa adalah satu sumber yang sangat sulit untuk dikontrol. Untuk itulah, pendidikan nilai di sekolah selalu

⁸ Penulis memberikan istilah "kurikulum formal" untuk menunjuk sebuah kurikulum tertulis yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga, misalnya Depdiknas, sedangkan kurikulum tersembunyi digunakan untuk menunjuk sebuah kurikulum yang tidak tertulis, namun mempunyai manfaat praktis dalam menunjang proses pendidikan.

dihadapkan pada berbagai kontradiksi nilai yang dikenal siswa. Bila di sekolah siswa diajarkan untuk selalu berbuat baik, sabar, namun melalui media massa, siswa diajarkan untuk berbuat anarkhis dalam menghadapi persoalan.

Kondisi lingkungan sosial yang penuh kontradiksi, membuat guru (dan tentu saja pendidik yang lain) akan mengalami kesulitan dalam memupuk nilai-nilai kebaikan dalam diri siswa nilai-nilai itu seperti: kesetiaan, kejujuran, ketulusan iman, kuasa diri, keteguhan dan kebaikan dan sebagainya (Darminta, 2006:89). Pendidikan nilai dalam praktiknya tidak dapat dilakukan melalui ceramah, khotbah atau cerita semata, karena teknik demikian hanya akan menambah pengetahuan namun jarang melahirkan pengalaman. Lickona (dalam Budiningsih, 2004: 6) memberikan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam pendidikan nilai (moral): pengertian (kognitif), perasaan (afektif) dan tindakan atau perilaku (psikomotorik). Guru harus memperhatikan ketiga unsur ini agar nilai yang ditanamkan tidak sekedar sebagai pengetahuan, akan tetapi benar-benar menjadi tindakan yang bermakna. Secara umum, di dalam proses pembelajaran, guru mempunyai serangkaian tanggung jawab sosial. Ghazali (Khan, 2005:107) mengungkapkan beberapa tanggung jawab guru selama proses pembelajaran, di antaranya guru hendaknya mampu mengubah cara pandang siswa terhadap kehidupan di dalam gaya moral, intelektual dan rohani.

Durkheim (1961:143) menjelaskan bahwa pendidikan moral (nilai) dapat dilakukan dengan menumbuhkan kebiasaan pada diri anak. Kebiasaan begitu mudah mendominasi pikiran anak, maka menurut Durkheim, kita dapat membiasakan (anak) untuk menaati aturan dan mengembangkan cita rasanya akan hal itu. Darminta (2006:92) melihat bahwa pendidikan nilai memerlukan satu bentuk keteladanan. Kasih (sayang) yang mendidik menuntut bahwa para guru bersedia menjadi orangtua dan teman sejati bagi diri siswa, yang selalu menempatkan siswa pada posisi penting atau prioritas

tinggi (Darminta, 2006: 96). Goleman (1995) menyarankan agar dalam proses pembelajaran nilai (moral), kegiatan bermain peran (*role play*) dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan mendukung perkembangan moral karena kematangan moral didukung dan akan berkembang sejajar dengan perkembangan empati dan peran sosial.

Hukuman dan ganjaran juga menjadi sebuah metode tersendiri dalam pendidikan nilai. Efektifitas metode ini berasal dari fakta bahwa metode ini secara kuat berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan individu (siswa). Seorang siswa yang menerima ganjaran akan memahaminya sebagai tanda penerimaan kepribadiannya yang membuat merasakan aman. Keamanan atau rasa aman merupakan salah satu kebutuhan psikologis, sementara hukuman, karena berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukainya akan dapat menguatkan rasa aman tersebut (Abdullah, 2005:220).

1.6.5 Pendidikan Nilai di Jepang dan China: Sebuah Perbandingan

a. Pendidikan Nilai di Jepang

Pendidikan di Jepang digunakan sebagai kunci dalam modernisasi maupun westernisasi Jepang, juga sebagai instrumen penting dalam memelihara nilai-nilai moral dan spiritual tradisional (Thut and Adams, 2005:480). Pendidikan nilai di Jepang saat ini dianggap menjadi kebutuhan yang sangat penting, setelah banyak terjadi dekadensi moral di kalangan generasi mudanya. Atas dasar itu, maka *Monbukagakusho* (Menteri Pendidikan Jepang) menekankan pentingnya memperhatikan perkembangan kepribadian siswa. Isu mengenai pendidikan nilai di Jepang, juga dimasukkan menjadi salah satu agenda di dalam Rainbow Plan, Reformasi Pendidikan di Jepang, yang salah satu isinya adalah “mendorong perkembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran moral di sekolah”

(Ramli, 2007). Menurut Passin (dalam Ikemoto, 1996), pendidikan di Jepang bertujuan untuk:

Education shall aim at the full development of personality, striving for the rearing of the people, sound in mind and body, who shall love truth and justice, esteem individual values, respect labour and have a deep sense of responsibility, and be imbued with the independent spirit, as builders of the peaceful state and society.

Secara formal, keberadaan pendidikan nilai juga dituangkan dalam kurikulum sekolah. Pada sistem pendidikan yang baru, pendidikan nilai telah diimplementasikan ke dalam kurikulum inti. Pendidikan nilai di Jepang diajarkan sejak Taman Kanak-kanak sampai SLTA (Ghozali, tanpa tahun). Secara umum, kurikulum pendidikan di Jepang, terdiri atas tiga kategori, yaitu: mata pelajaran akademik, pendidikan moral (nilai), dan aktifitas atau kegiatan khusus. Pada dasarnya, pendidikan moral di Jepang, dikembangkan dari keseluruhan aktifitas/kegiatan siswa di sekolah. Pendidikan nilai juga diberikan tidak hanya pada jam “pendidikan moral”, namun harus pula diberikan pada mata pelajaran lain di sekolah secara bersamaan (Ikemoto, 1996).

Pendidikan nilai di Jepang, secara khusus dapat digambarkan menjadi enam subyek, yaitu (Ikemoto, 1996):

- a. membantu perkembangan semangat untuk menghargai martabat orang lain dan perasaan hidup.
- b. memelihara usaha keras untuk mewarisi dan membangun budaya tradisional dan mengembangkan budaya yang berharga secara individual.
- c. memelihara usaha keras untuk membentuk dan mengembangkan masyarakat dan negara yang demokratis.
- d. memelihara usaha untuk mewujudkan perdamaian masyarakat internasional.
- e. memelihara upaya untuk membuat keputusan yang independen.

f. membantu perkembangan perasaan moral.

Isi (*contents*) pendidikan moral di Jepang antara lain (Ikemoto, 1996):

- a. Berkaitan dengan diri Individu (*Regarding Self*), meliputi: mengembangkan sikap yang tidak berlebih-lebihan; kerajinan dan ketekunan; keberanian dan keteguhan hati; ketulusan, kesungguhan dan keikhlasan; kebebasan dan keteraturan; cinta kebenaran.
- b. Hubungan dengan orang lain (*Relation to others*), meliputi: kesopanan; perhatian/ketenggangan dan kebaikan hati; persahabatan; terima kasih dan penghormatan; kesederhanaan dan kerendahan hati.
- c. Hubungan dengan alam (*relation to nature*), meliputi: menghormati alam; menghormati kehidupan, keindahan atau estetika; kebangsawanan.
- d. Hubungan dengan kelompok dan masyarakat (*relation to group and society*), meliputi: kewajiban serta tugas sebagai warga negara; keadilan; partisipasi dalam kelompok dan kepedulian sosial; industri; kepedulian terhadap anggota keluarga; kepedulian terhadap guru dan orang lain di sekolah; partisipasi dalam masyarakat; kepedulian pada tradisi dan cinta bangsa; kepedulian pada budaya lain.

Selain itu, pendidikan moral juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, yaitu: Bahasa Jepang, *Social Studies*, Ilmu Pengetahuan Ilmiah, Musik, Kesehatan dan Pendidikan Fisik dan Bahasa Asing. Terakhir, pendidikan moral diintegrasikan melalui kegiatan-kegiatan khusus di sekolah, antara lain: kegiatan di kelas, organisasi siswa, kelompok kegiatan siswa, dan aktifitas sekolah (upacara, kegiatan khusus, pendidikan Fisika, kegiatan lapangan, dll).

b. Pendidikan Nilai di China

Masyarakat China meyakini bahwa perilaku yang baik dan karakter, merupakan hal yang sangat penting (*essential*) untuk

menyiapkan perilaku individu serta mempunyai fungsi yang baik bagi masyarakat, untuk itu unsur ini dimasukkan ke dalam komponen kurikulum pendidikan di China (Clarcken, tanpa tahun). Pendidikan nilai dimasukkan ke dalam materi pendidikan dasar, baik di tingkat dasar (Sekolah Dasar) maupun di tingkat menengah (SMP).

Pendidikan di Sekolah Dasar, secara umum bertujuan untuk *pertama*, mengembangkan karakter moral siswa melalui pengajaran (*teaching*) untuk mencintai tanah air, masyarakat China, pekerjaan tangan, sosialisme dan Partai Komunis China dan *public property*. *Kedua*, memberikan pendidikan dasar kepada siswa, mengembangkan keterampilan membaca, menulis dan pengetahuan ilmiah, pengetahuan sosial dan membangun kebiasaan siswa yang baik. *Ketiga*, mengembangkan kemampuan fisik siswa (Powell, 1982). Pendidikan di Sekolah Menengah bertujuan, *pertama*, membangun semangat patriotisme dan internasionalisme dalam diri siswa. *Kedua*, memberikan kemampuan dasar siswa dalam berhitung, berbahasa asing, berbahasa China dan sebagainya, serta memberikan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. *Ketiga*, memberikan kemampuan siswa untuk mengembangkan fisik dan menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan (Powell, 1982).

Tujuan dasar pendidikan nilai di China adalah menumbuhkan dan mengembangkan dalam diri siswa untuk menjadi warga negara yang mencintai tanah airnya, etnis sosial, berperilaku yang baik dan taat hukum (Anonim, 2007). Kemudian, pendidikan nilai juga bertugas untuk memandu atau menjadi pedoman bagi tumbuhnya pandangan yang baik mengenai dunia, hidup dan ujian, menumbuhkan kesadaran sosial, serta melahirkan generasi yang mempunyai ide-ide cemerlang, memiliki integritas moral, pengetahuan dan budaya dan memiliki rasa kedisiplinan. Nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan nilai di

China, dikembangkan dari ajaran Mao Zedong dan Deng Xiaoping's yang menyebutkan adanya lima perasaan cinta (*Five Loves*), yaitu: cinta tanah air; cinta manusia; cinta pekerjaan; cinta ilmu pengetahuan dan cinta sosialisme (Anonim, 2007). Pentingnya pendidikan karakter, telah dituangkan ke dalam program reformasi pendidikan yang dikemukakan Deng Xiapong pada tahun 1985. Xiapong menyebutkan:

"Thought the reform of education system, it is imperative to bear in mind is for the fundamental purpose of turning every citizen into a man or woman of character and cultivating more constructive members of society" (dalam Megawangi, 2007).

Pendidikan nilai merupakan komponen penting dalam pendidikan sekolah. Pendidikan ini mempunyai beberapa bentuk dan variasi dalam metode pembelajaran, di antaranya adalah melalui metode kasus moral (*moral causes*) di sekolah dasar dan sekolah menengah; pengajaran di kelas melalui mata pelajaran yang lain; organisasi dan pengelolaan aktivitas kelas dan sekolah; kegiatan sosial setelah jam sekolah; serta melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang baik yang dapat mendidik dan mempengaruhi siswa (Anonim, 2007).

1.7 Metode Penelitian dan Analisis Data

1.7.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak pengelola serta staf pengajar di PKBM "Argowilis" di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yaitu Kang Sakhirin (tutor Pendidikan Agama Islam dan Geografi), Kang Slamet (tutor Matematika) dan Kang Darto (tutor Biologi), Subyek pendukung dalam penelitian ini diambil beberapa warga-belajar yaitu Ardi, Sokhimin dan Burhan (warga belajar kelas 1 Paket B); Salimin, Isti dan Solikhin (warga belajar kelas 2 Paket B); Musrifah, Azizah dan Maratus (warga belajar kelas 3 Paket B).

1.7.2 Lokasi Penelitian

PKBM “Argowilis” di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Peneliti sengaja mengambil PKBM ini dikarenakan PKBM ini telah diakui oleh pemerintah daerah (melalui Dinas Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Banyumas). Sekolah ini mempunyai program PAUD, kegiatan belajar setara SMP (Paket B) dan setara SMA (Paket C).

1.7.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan ini agar dapat mengetahui proses pendidikan nilai yang dilakukan di sekolah ini secara lebih mendalam.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Beberapa hal yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini di antaranya adalah: kondisi fisik sekolah, proses pembelajaran di sekolah, interaksi antara guru dengan Warga Belajar, interaksi antarwarga belajar serta kurikulum. Pada proses pengamatan, Peneliti tidak masuk di kelas untuk mengikuti proses pembelajaran, akan tetapi peneliti hanya mengamati dari luar ruang kelas. Observasi dilakukan selama 2 bulan (Februari sampai Maret 2008).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pengelola sekaligus pengajar (tiga orang) dan warga-belajar (enam orang). Topik yang menjadi bahan wawancara adalah seputar proses dan metode pendidikan nilai di sekolah ini serta bagaimana hubungan antara tutor, warga belajar dan orang tua warga belajar.

c. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD dilakukan untuk mewawancarai warga belajar mengenai proses pendidikan yang dilakukan di sekolah mereka. FGD dilakukan dengan

beberapa warga belajar Paket B kelas 1, 2 dan 3. FGD dilakukan selama satu kali, namun pada beberapa kesempatan, peneliti melakukan wawancara dengan warga belajar secara informal (tidak melalui FGD).

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi kurikulum sekolah, data mengenai fasilitas sekolah, data tentang jumlah Warga Belajar, buku ajar/modul dan kegiatan-kegiatan sekolah. Kurikulum yang digunakan di PKBM ini tidak berbeda dengan kurikulum pendidikan nonformal yang lain. Fasilitas belajar di sekolah ini cukup lengkap, ada ruang kelas yang masih dalam tahap pembangunan, komputer, tape, buku-buku pelajaran serta buku-buku pengetahuan umum, mesin jahit, alat musik karawitan, kolam ikan dan tempat bertani. Jumlah warga belajar Paket B untuk setiap kelas berjumlah 20 (kelas 1), 29 (kelas 2) dan 40 orang (kelas 3). Kegiatan sekolah ini di antaranya camping, pramuka serta latihan komputer untuk warga belajar.

1.7.5 Metode Penentuan Informan

Penulis menentukan informan pertama kali dengan menunjuk ketua PKBM (Pak Sakhirin) sebagai informan utama (kunci), kemudian ia menunjuk beberapa tutor sebagai informan. Namun dari beberapa tutor, hanya tiga dua orang tutor yang secara intensif memberikan keterangan rinci. Untuk menentukan warga belajar yang diwawancarai, penulis tidak menentukan kriteria secara khusus namun didasarkan pada kesediaan warga belajar untuk diwawancarai.

1.7.6 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan para pengelola, pengajar dan warga-belajar di sekolah tersebut. Data ini diperoleh melalui proses observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan

para pengelola sekaligus pengajar (tiga orang) dan warga-Belajar (enam orang). Topik yang menjadi bahan wawancara adalah seputar proses pendidikan nilai di sekolah ini serta bagaimana hubungan antara tutor, warga belajar dan orang tua.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi: data mengenai kurikulum sekolah, data mengenai fasilitas sekolah, data tentang jumlah Warga Belajar, buku ajar/modul dan kegiatan-kegiatan sekolah. Kurikulum yang digunakan di PKBM ini tidak berbeda dengan kurikulum pendidikan nonformal yang lain. Fasilitas belajar di sekolah ini cukup lengkap, ada ruang kelas yang masih dalam tahap pembangunan, komputer, tape, buku-buku pelajaran serta buku-buku pengetahuan umum, mesin jahit, alat musik karawitan, kolam ikan dan tempat bertani. Jumlah warga belajar Paket B untuk setiap kelas berjumlah 20 (kelas 1), 29 (kelas 2) dan 40 orang (kelas 3). Kegiatan sekolah ini di antaranya camping, pramuka serta latihan komputer untuk warga belajar.

1.7.7 Definisi Operasional

a. Pendidikan Nilai

Pendidikan yang berisi untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik selama proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Proses ini meliputi proses pendidikan dengan menggunakan kurikulum formal maupun kurikulum tersembunyi.

b. Nilai-nilai Sosial

Nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna memperoleh kehidupan masyarakat yang harmonis

c. Proses Pendidikan Nilai

Proses penanaman nilai-nilai dalam diri siswa, sampai bagaimana nilai-nilai itu diterapkan Warga Belajar dalam kehidupan sosialnya melalui

berbagai tindakan sosialnya. Proses ini dicapai melalui dua cara, yaitu pertama, melalui *kurikulum formal*, yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran di sekolah. Kedua melalui *kurikulum tersembunyi*, yang melalui proses ini, Warga Belajar belajar melalui pengalaman-pengalaman dirinya, baik di dalam kelas, di luar kelas maupun dalam kehidupan di masyarakat di sekitarnya.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai proses tersebut di antaranya:

- 1) Ada kurikulum pendidikan nilai (kurikulum formal), seperti: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, maupun mata pelajaran lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan proses pendidikan nilai di sekolah.
- 2) Ada kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang digunakan dalam proses pendidikan nilai, misalnya: proses penegakkan tata tertib sekolah, atau bagaimana guru memperlakukan Warga Belajar yang melakukan kesalahan; adanya dialog antara guru dan Warga Belajar dalam setiap proses pembelajaran.
- 3) Ada tata tertib yang diberlakukan di sekolah.
- 4) Kesadaran Warga Belajar melakukan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu, seperti: adanya kerja sama dengan sesama, sopan santun, melakukan ritual keagamaan, disiplin serta kesadaran Warga Belajar menerima hukuman ketika melakukan kesalahan, atau ketika Warga Belajar memperoleh pengalaman-pengalaman di sekolah.

d. PKBM

PKBM merupakan suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan PKBM adalah untuk memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.

1.7.8 Pengujian Validitas Data

Untuk memperoleh validitas data hasil penelitian, penulis menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan pengujian ulang (membandingkan) keterangan yang diberikan tutor dengan mewawancarai informan yang lain (warga belajar). Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan keterangan atau informasi yang diberikan informan dengan melakukan observasi di lokasi penelitian.

1.7.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan model interaktif. Model ini mempunyai empat proses yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992:20).

- a. Pada tahap awal, Penulis melakukan proses pengumpulan data di lapangan melalui proses observasi, interview dan pengumpulan dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Selanjutnya, Penulis melakukan reduksi data yang merupakan proses seleksi atas data yang telah diperoleh dari tahap pertama dengan membuat transkrip hasil wawancara, observasi dan pengumpulan dokumentasi. Pada tahap ini, nantinya sangat dimungkinkan Penulis akan kembali lagi ke lapangan apabila terdapat data yang dinilai belum lengkap.
- c. Proses penyajian data dilakukan dalam bentuk membuat kutipan (transkrip hasil wawancara, observasi dan pengumpulan dokumentasi).
- d. Pada tahap akhir, Penulis membuat kesimpulan sementara dari hasil pengumpulan data.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disajikan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Pada Bab 1 ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah penelitian, signifikansi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan landasan teori serta metode penelitian dan analisis data.

Bab 2 Deskripsi Lokasi Penelitian, berisi mengenai kondisi PKBM “Argowilis” yang Menjadi Lokasi Penelitian.

Bab 3 Nilai-Nilai Sosial dalam Kurikulum Formal. Bab 3 ini berisi mengenai uraian dan analisis atas nilai-nilai sosial yang akan dikembangkan serta ditanamkan dalam diri siswa melalui kurikulum formal (Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila)

Bab 4 Proses Pembelajaran Nilai di PKBM “Argowilis”. Bab ini berisi mengenai hasil serta analisis hasil penelitian di PKBM “Argowilis”.

Bab 5 Penutup, berisi kesimpulan atas hasil penelitian dan implikasi teoritis.